

**ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENERIMA
BANTUAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang



Disusun Oleh :

KHOIRUNNISA WULANDARI

18060111

EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN 2022

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

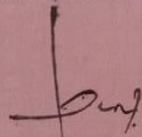
ANLISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENERIMA
BANTUAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI SUMATERA
BARAT

Nama : Khoirunnisa Wulandari
BP/NIM : 2018/18060111
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Mengetahui,

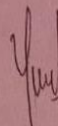
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi



Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si
NIP.19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Pembimbing



Yeniwati, SE, ME
NIP. 19760222 200501 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

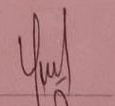

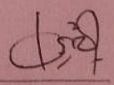
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI TERHADAP PENERIMA
BANTUAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA (KKS) DI SUMATERA
BARAT**

Nama : Khoirunnisa Wulandari
NIM/TM : 18060111/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Yewiwati, SE, ME	1. 
2	Anggota	: Muhammad Irfan, SE, M.Si	2. 
3	Anggota	: Isra Yeni, SE, M.SE	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUNNISA WULANDARI
Nim/Th. Masuk : 18060111/2018
Tempat/Tanggal Lahir : Air Hangat / 23 Mei 1999
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Air Hangat
Kec. Rao selatan Kab. Pasaman
No. Hp/Telephone : 085835116342
Judul Skripsi : Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima
Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) DI Provinsi
Sumatera Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis / skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik / sarjana baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis / skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



11 Agustus 2022

Khoirunnisa Wulandari
Khoirunnisa Wulandari
18060111

ABSTRAK

Khoirunnisa Wulandari, (2022) : Analisis Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat. Pada penelitian ini menggunakan data Kor Susenas 2017 dengan sampel yang digunakan sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Jenis data Survei Sosial Ekonomi adalah sekunder. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017. Alat analisis yang di gunakan analisis regresi logistik (*Logistic Regression*), dan jumlah seluruh responden yaitu 2.511 orang.

Uji dari hasil penelitian terdapat satu variabel yang tidak mempunyai pengaruh terhadap Kepala Rumah Tangga penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera yaitu variabel kepemilikan tempat tinggal yang nilai probabilitasnya sebesar 0.075. Sedangkan tiga variabel lainnya yaitu jenjang pendidikan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga penerima Kartu keluarga Sejahtera.

Kata Kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Program Kartu Keluarga Sejahtera

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal penelitian yang berjudul “**Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat**”. Adapun tujuan penulisan proposal penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana, pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Dr. Idris, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. **Melti Roza Adry, S.E., M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. **Dewi Zaini Putri, S.E., M.M.** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. **Yeniwati, SE.,ME** selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. **Muhammad Irfan, S.E., M.Si.** dan **Isra Yeni, SE., M.SE.** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu serta segala saran dan masukan kepada penulis sebagai koreksi dan penyempurnaan penulisan ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Dosen Ilmu Ekonomi beserta stafnya yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang sangat berguna.
7. Untuk Orang Tua tercinta, Abdul Halim dan Leni Marlina yang telah membesarkan dan mendidik dengan sabar hingga saat ini, yang selalu memberikan kasih sayang, nasihat, dukungan, dan motivasi serta selalu sabar menghadapi berbagai sifat anak-anaknya sampai Nisa bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ayah dan ibu senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT, Amiin.
8. Kepada semua keluarga dan saudara/i saya yang selalu memberi Do'a, dukungan dan semangat.
9. Terimakasih juga kepada bang Randa yang selalu memberikan support, semangat dan selalu mendukung apapun itu, tempat bercerita kalau ada masalah dan yang selalu ada sampai saat ini, yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi sehingga saya bersemangat lagi untuk mengerjakannya.
10. Untuk bang Abror dan bang Abram selaku senior saya terimakasih telah mau membantu dalam pengerjaan skripsi saya dikala saya sedang kesusahan.
11. Untuk teman-teman magang MBKM di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Rizki, Tina, Sandra, Sausan, Fadly, dan Hafis terimakasih selalu menolong dalam pengerjaan skripsi ini dan sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana.

12. Untuk teman-teman seangkatan 2018 yang sama-sama berjuang dari awal perkuliahan. Semoga ilmu yang telah kita peroleh selama proses belajar dan kuliah di jurusan ini bisa menjadi berkah dan berguna untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain.
13. Untuk sahabat saya Fita, Ami, dan Fitri terimakasih selalu mengingatkan saya dan teman pergi jalan-jalan.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu terimakasih sebanyak-banyaknya.
15. Dan yang paling utama, Allah SWT yang telah memberi segala nikmat, rezki, ujian dan cobaan dalam hidup ini. Semoga hamba tetap bersyukur dan berterimakasih atas apapun yang terjadi. Aamiin Ya Rabb.
16. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulisan kedepannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amalan yang baik

dan mendapat imbalan dari Allah SWT, Amin. Akhir kata penulis ucapkan Terima kasih.

Padang, Agustus 2022

Penulis,

Khoirunnisa Wulandari

NIM. 18060111

DAFTAR ISI

	Halaman
ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAT TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Kemiskinan.....	11
2. Kondisi Sosial Ekonomi	15
3. Pengeluaran Pemerintah.....	23
4. Program Kartu Keluarga Sejahtera	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Variabel Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Defenisi Operasional.....	34
H. Teknik Analisis Data	35

I. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Gambaran umum objek penelitian.....	41
2. Deskripsi variabel penelitian	44
3. Hasil estimasi regresi logistik.....	59
4. Uji hipotesis	52
B. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Variabel dan skala Pengukuran Data Analisa Logistik	39
2. Jumlah kepala rumah tangga penerima dan bukan penerima Kartu Keluarga Sejahtera di Sumatera Barat Tahun 2017.....	45
3. Jumlah kepala rumah tangga berdasarkan jenjang pendidikan	46
4. Jumlah kepala rumah tangga berdasarkan pekerjaan	47
5. Jumlah kepala rumah tangga berdasarkan jaminan kesehatan	48
6. Jumlah kepala rumah tangga berdasarkan kepemilikan tempat tinggal	48
7. Hasil pendugaan parameter dan odds ratio Regresi Logistik	50
9. Hasil uji Likelihood Ratio (G)	52
10. Hasil Uji Wald (Z statistik)	53
11. Marginal Effeck	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat	
Tahun 2016-2021	2
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Estimasi Logistik	68
Lampiran 2. Hasil Estimasi Logistik Odds Ratio	69
Lampiran 3. Hasil Estimasi Efek Marginal rata-rata dari setiap variabel peubah (Multiplier) Model Logit	69
Lampiran 4. Hasil Estimasi Goodness of fit test	70

BAB I

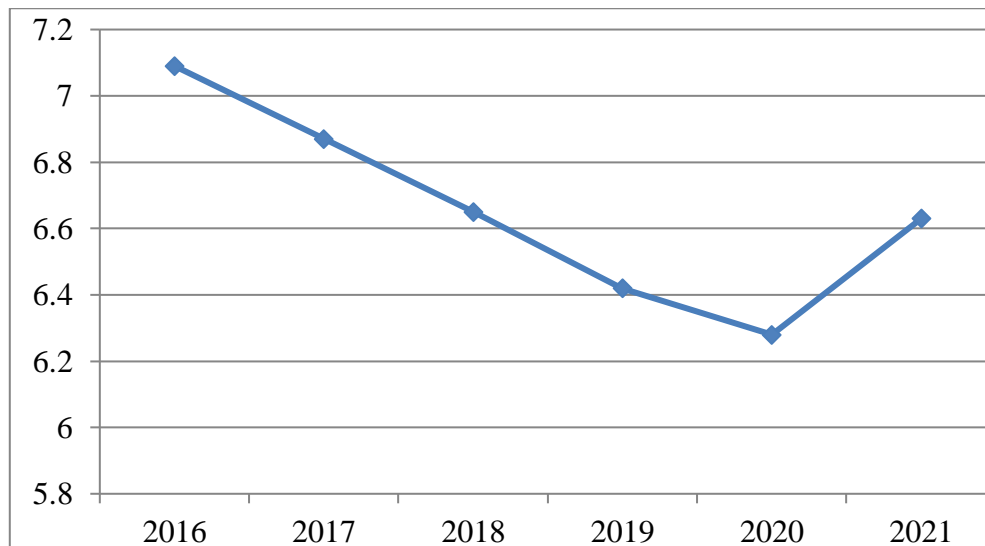
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kuncoro, 2004). Sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat masih banyak kekurangan hak-hak dasar seperti kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kondisi perumahan serta dampak dari kenaikan harga BBM yang dimulai sejak tahun 2008. Akibatnya, tidak jarang anak dan keluarganya terjebak dalam berbagai beban kerja yang dialami orang tuanya. Kebijakan pemerintah menaikkan harga dasar BBM berarti harga kebutuhan pokok akan terus naik, dan bagi masyarakat yang lebih miskin tentunya akan sulit beradaptasi sehingga menurunkan daya beli. Mengkoordinasikan perkembangan harga di pasar, masyarakat tentu akan terkena dampak sosial, penurunan taraf hidup serta meningkatnya kesulitan dan kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat (September 2021), terdapat sekitar 26,50 juta orang atau sekitar 9,71% penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya untuk kehidupan. Tingkat kesejahteraan dapat dari kondisi ekonomi, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakatnya.

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera barat

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan pada tahun 2020. Dimana pada tahun 2016 persentase penduduk miskin yaitu 7.09%, pada tahun 2017 turun menjadi 6.87%, pada tahun 2018 menjadi 6.65%, tahun 2019 menjadi 6.42%, tahun 2020 turun lagi menjadi 6.28%, dan pada tahun 2021 naik menjadi 6.63%.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (1) tertanam jelas bahwa fakir miskin merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah. Hal tersebut di perkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial

menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2009, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdapat pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lainnya dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah menjadi pelaksanaan UUD 1945. Pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Untuk menyikapinya, Kementrian Sosial (KEMENSOS) memperkenalkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada April 2016 yang dikirimkan kepada masyarakat melalui PT.POS Indonesia. KKS merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dalam kebijakan kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah telah memperkenalkan program pengentasan kemiskinan seperti program PPS. Program ini termasuk dalam Program Keluarga Produktif bersama dengan skema Kartu Tabungan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Program ini menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). KKS

adalah peta yang dikeluarkan pemerintah yang menandai keluarga kurang mampu. Dengan melaksanakan program ini, pemerintah dapat meningkatkan harkat dan martabat keluarga kurang mampu melalui perlindungan dan pemberdayaan. Data penerima manfaat program kartu keluarga sejahtera menggunakan data dari Basis Data Terpadu (BDT). BDT merupakan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah melalui program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini telah menyeluruh ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia termasuk salah satunya provinsi Sumatera Barat.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu diantaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan / bantuan sosial dan berada didalam panti / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Bantuan yang diterima masyarakat penerima KKS sebanyak Rp.200.000/bulan . Masyarakat penerima bantuan KKS di lapangan ditemukan bahwa masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan KKS sedangkan bantuan tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Penulis berasumsi

bahwa tidak efektifnya penerimaan KKS ini di kaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa menurut keadilan sosial maka kebijakan ini tidak adil dan tidak mencerminkan konsep kesejahteraan. Keadilan sosial akan tercapai apabila kesejahteraan juga tercapai. Fenomena menunjukkan kebijakan tersebut tidak merata dan tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan terjadinya kesalahan data yang muncul pada saat kartu diluncurkan. Walaupun pihak birokrasi desa sudah memberikan revisi data terbaru namun justru yang muncul data lama. Aparat desa juga sudah melaporkan kepada birokrasi pemerintahan namun sampai saat ini tidak ada kejelasan mengenai Kartu Keluarga Sejahtera tersebut. KKS juga tidak efektif dilaksanakan, dikarenakan kartu yang tidak tepat sasaran berakibat pada penggunaan dan pemanfaatan kartu pula. Banyak kartu-kartu yang sudah ditangan masyarakat namun belum bisa digunakan dikarenakan isi kartu tersebut kosong.

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status seperti kondisi tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, seperti pekerjaan atau pendapatan.

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan, diharapkan seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.

Masyarakat yang mempunyai tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan. Masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan bisa hidup sejahtera, jauh dari kemiskinan. Dengan anggapan bahwa sekolah hanya membuang waktu dan biaya saja. Pendidikan dasar saja belum cukup untuk menunjang pembangunan yang sedang berlangsung, masih banyak masyarakat yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan dasar sampai dengan selesai.

Selanjutnya peluang kerja juga berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuannya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi/mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, namun orang yang bekerja juga berfungsi untuk mendapatkan status, untuk diterima menjadi bagian dari satu unit status sosial ekonomi dan untuk memainkan suatu peranan dalam statusnya.

Kesehatan sangat erat hubungannya dengan faktor keturunan lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misalnya sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia.

Begitu juga dengan kondisi tempat tinggalnya, rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tentang evaluasi kebijakan program bantuan pemerintah Kartu Keluarga Sejahtera. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kondisi**

Sosial Ekonomi Terhadap Penerima Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jenjang pendidikan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaiman pengaruh pekerjaan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana pengaruh jaminan kesehatan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan tempat tinggal terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pekerjaan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh jaminan kesehatan terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.
4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan tempat tinggal terhadap penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan tambahan wawasan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang di peroleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Masyarakat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai penerimaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintah Terkait (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah yang terutama terkait program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

4. Bahan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
5. Sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana suatu kelompok maupun individu tidak dapat memenuhi hak dasarnya untuk menjaga serta meningkatkan kehidupannya. Kondisi ini ditandai dengan kurangnya penghasilan dalam memenuhi kebutuhan pokok baik berupa kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan (Kuncoro, 2006).

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah konsep kemiskinan yang mengacu pada kepemilikan materi dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau kekeluarga. Kedua istilah itu menunjuk pada perbedaan sosial (*social distinction*) yang ada dalam masyarakat berangkat dari distribusi pendapatan. Perbedaannya adalah bahwa pada kemiskinan absolut ukurannya sudah terlebih dahulu ditentukan dengan angka-angka nyata (*garis kemiskinan*) dan atau indikator atau kriteria yang digunakan, sementara pada kemiskinan relatif kategori kemiskinan ditentukan berdasarkan perbandingan relatif tingkat kesejahteraan antar penduduk.

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut atau mutlak berkaitan dengan standar hidup minimum suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan (poverty line) yang sifatnya tetap tanpa dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu masyarakat. Garis Kemiskinan (poverty line) adalah kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya. Pembentukan garis kemiskinan tergantung pada defenisi mengenai standar hidup minimum. Sehingga kemiskinan abosolut ini bisa diartikan dari melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin. World Bank (2008) menghitung tingkat dan jumlah penduduk miskin absolut dengan menggunakan ukuran tunggal yang seragam untuk semua Negara.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif pada dasarnya menunjuk pada perbedaan relatif tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Mereka yang berada dilapis terbawah dalam persentil derajat kemiskinan suatu masyarakat digolongkan sebagai penduduk miskin. Dalam kategori seperti ini, dapat saja mereka yang digolongkan sebagai miskin sebenarnya sudah dapat mencukupi hak dasarnya, namun tingkat keterpenuhannya berada dilapisan terbawah.

Kemiskinan relatif memahami kemiskinan dari dimensi ketimpangan antar kelompok penduduk. Pendekatan ketimpangan tidak berfokus pada pengukuran garis kemiskinan, tetapi pada besarnya perbedaan antara 20 atau 10 persen masyarakat paling bawah dengan 80 atau 90 persen masyarakat lainnya. Kajian yang berorientasi pada pendekatan ketimpangan tertuju pada upaya memperkecil perbedaan antara mereka yang berada dibawah (miskin) dan mereka yang makmur dalam setiap dimensi statifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan merupakan suatu permasalahan yang berbeda dengan kemiskinan.

a. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah konsep abstrak yang dapat dijelaskan secara berbeda dimana tergantung dari pengalaman dan perspektif analis. Cara pandang analis akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana kemiskinan itu terjadi (sebab-sebab kemiskinan) dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Oleh karena itu, agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjelaskan pengertian dan penyebab kemiskinan secara lengkap.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk kedalam kategori miskin. Namun, menurut World Bank setidaknya ada tiga faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti: makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
2. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan didepan institusi negara dan masyarakat.
3. Rentan terhadap guncangan ekonomi, terkait dengan ketidakmampuan menanggulangnya.

b. Ukuran Kemiskinan

Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrument yang tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pengukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk menguranginya (World Bank, Introduction to Poverty Analysis, 2008).

Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah Head Count Index (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line).

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto (2007:89) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya. Menurut Soekanto (2001:237) menyatakan bahwa komponen pokok kedudukan sosial ekonomi meliputi ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan.

Mengenai kondisi sosial ekonomi, Soekanto yang dikutip Zaenal Arifin (2002), menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok dimana kebiasaan hidup yang membudaya ini biasanya disebut dengan *culture activity*, kemudian juga menjelaskan bahwa dalam semua masyarakat di dunia baik yang sederhana maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria dalam membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, karena disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang semua yang dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun ragamnya.

Kondisi ekonomi berperan penting dalam pendidikan seorang anak. Peranan kondisi ekonomi dalam pendidikan anak memegang satu posisi yang sangat penting. Dengan adanya perekonomian yang cukup memadai, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya jelas lebih luas, maka ia akan mendapat kesempatan yang lebih luas juga untuk mengembangkan kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan tanpa adanya sarana dan prasarana itu.

Menurut Juariyah (2010), keadaan sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Menurutnya pula pada ada ciri-ciri keadaan sosial ekonomi yaitu sebagai berikut :

- a. Lebih berpendidikan.
- b. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan, dan pengenalan diri terhadap lingkungan.
- c. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar.
- d. Mempunyai ladang luas.
- e. Lebih berorientasi pada ekonomi komersial produk.
- f. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit.
- g. Pekerjaan lebih spesifik.

Dapat ditarik kesimpulan kondisi sosial ekonomi yaitu suatu posisi, kedudukan, jabatan, kepemilikan yang dimiliki seorang individu ataupun kelompok yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan asset

rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga dan pekerjaan yang dimiliki yang akan sangat mempengaruhi status sosial seseorang, kelompok ataupun keluarga di lingkungan masyarakatnya.

a. Klasifikasi Dan Tingkat Status Sosial Ekonomi

Klasifikasi status sosial ekonomi menurut Coleman dan Cressey dalam Sumardi (2004:76) antara lain sebagai berikut:

1) Status sosial ekonomi

Merupakan kelas sosial yang berada paling atas dari tingkatan sosial yang terdiri dari orang-orang yang sangat kaya seperti kalangan konglomerat, mereka sering menempati posisi teratas dari kekuasaan. Umumnya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik.

2) Status sosial ekonomi bawah

Merupakan kedudukan seseorang di masyarakat yang diperoleh berdasarkan penggolongan menurut kekayaan dan status sosialnya, dimana harta kekayaan yang dimiliki serta status sosial yang dimiliki termasuk kurang jika dibandingkan dengan rata-rata masyarakat pada umumnya serta tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Sosial Ekonomi

Soekanto memiliki ukuran atau kriteria dalam menggolongkan anggota masyarakat dalam suatu lapisan sosial, kriteria tersebut diantaranya ukuran kekayaan,

ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan dan ukuran ilmu pengetahuan. Namun status sosial ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

a) Pendidikan

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat bermanfaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan, diharapkan seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru baik berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru serta bagaimana cara berpikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya.

Pendidikan sekolah sangat diperlukan untuk mencapai sumber daya yang berkualitas. Dalam pembangunan yang mengarah pada era industrialisasi perlu dikembangkan suatu model (system) pengelolaan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka untuk dapat memasuki lapangan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sehingga perlu ditetapkan mutu keterampilan kerja pada jenjang jabatan atau produksi.

Ngadiyono (1998), membedakan berdasarkan isi program dan penyelenggaraannya menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pendidikan formal merupakan pendidikan resmi di sekolah-sekolah, penyelenggaraannya teratur dengan penjenjangan yang tegas, persyaratan

tegas, disertai peraturan yang ketat, pendidikan ini didasarkan pada peraturan yang tegas.

2. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh melalui hasil pengalaman, baik yang diterima dalam keluarga maupun masyarakat. Penjenjangan dan penyelenggaraannya tidak ada, sistemnya tidak diformulasikan.
3. Pendidikan non formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah, penyelenggaraannya teratur. Isi pendidikannya tidak seluar pendidikan formal, begitu juga dengan peraturannya.

b) Pekerjaan

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, serta memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan sebagainya (Mulyanto, 1985:2).

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuannya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Soeroto (1986:167) menjelaskan bahwa dengan bekerja orang akan memperoleh pendapatan, dari pendapatan yang diterima orang tersebut diberikan kepadanya dan keluarganya untuk mengkonsumsi barang dan jasa hasil pembangunan dengan demikian menjadi lebih jelas, barang siapa yang mempunyai produktif, maka ia telah nyata berpartisipasi secara nyata dan aktif dalam pembangunan.

Ditinjau dari segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi/mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, namun orang yang bekerja juga berfungsi untuk mendapatkan status, untuk diterima menjadi bagian dari satu unit status sosial ekonomi dan untuk memainkan suatu peranan dalam statusnya (Kartono, 1991:21).

Dalam pedoman ISCO (International Standart Clasification of Oeception) pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Professional ahli teknik dan ahli jenis
2. Kepemimpinan dan ketatalaksana
3. Administrasi tata usaha dan sejenisnya
4. Jasa
5. Petani
6. Produksi dan operator alat angkut.

Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
2. Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan di bidang penjualan dan jasa.
3. Pekerjaan yang berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut atau bengkel.

c) Jaminan Kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian Kesehatan adalah “keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Sedangkan menurut Mu’rifah (2007:1.4) kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri dalam batas-batas kemampuannya, agar mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik- baiknya.

Kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Bagi yang belum memasuki usia kerja, anak, dan remaja, atau bagi yang sudah tidak bekerja (pensiun) atau usia lanjut, yakni mempunyai kegiatan, misal sekolah atau kuliah bagi anak dan remaja, dan kegiatan pelayanan sosial bagi yang lanjut usia, Soekidjo Notoatmodjo (2007:3). Kesehatan

sangat erat hubungannya dengan faktor keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.

d) Tempat Tinggal

Menurut Kaare Svalastoga dalam Sumardi (2004) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:

- 1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.
- 2) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah ke bawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
- 3) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.

3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah biasanya direncanakan jauh lebih dulu. Jadi pemerintah membuat daftar anggaran yang akan dikeluarkan setiap tahunnya, yang dijabarkan dalam Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN). Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

1. Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut : (Boediono, 1999)

- a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

2. Teori Mikro

Pada teori mikro, pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Hubungan antara permintaan dan penawaran akan barang public menentukan jumlah barang public yang akan disediakan, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Mangkoesebroto (1994) perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor, yaitu :

- a. Perubahan permintaan akan barang publik.
- b. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik dan perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
- c. Perubahan kualitas barang publik.

d. Perubahan harga faktor produksi.

4. Program Kartu Keluarga Sejahtera

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu diantaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan berada didalam panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera :

1. Membantu PMKS miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

Manfaat :

Bantuan KKS yang akan diterima PMKS setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada tahun anggaran 2015, bantuan KKS yang akan diberikan dalam waktu 3 bulan dengan total Rp. 600.000,-. Untuk selanjutnya pada tahun 2016 direncanakan akan diberikan Rp. 200.000,- setiap bulannya.

Kriteria :

1. Usia 22 tahun keatas
2. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti/ LKS
3. Lanjut usia yang tinggal di panti/ LKS
4. Gelandangan dan pengemis yang tinggal dipanti atau dibawah kolong jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni
5. Korban penyalahgunaan napza yang tinggal di panti/ LKS
6. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang terdahulu dalam penelitian ini antara lain :

1. Muhammad Arif Suhendra, Dra. Dwi Ispriyanti, M.Si, dan Drs. Sudarno, M.Si, (2020) yang berjudul “Ketepatan Klasifikasi Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera di Kota Semarang Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner dan Metode Chaid” yang Hasil analisisnya menunjukkan bahwa dengan menggunakan Regresi Logistik Biner, faktor-faktor yang berpengaruh adalah jumlah anggota keluarga dan jenjang pendidikan kepala keluarga dengan ketepatan klasifikasi sebesar 88% dan kesalahan 12%, sedangkan dengan menggunakan CHAID, faktor-faktor yang berpengaruh adalah jumlah anggota keluarga, status perkawinan, usia kepala keluarga, jenjang pendidikan kepala

keluarga dan kepemilikan/penguasaan HP dengan ketepatan klasifikasi sebesar 90,2% dan kesalahan 9,8%.

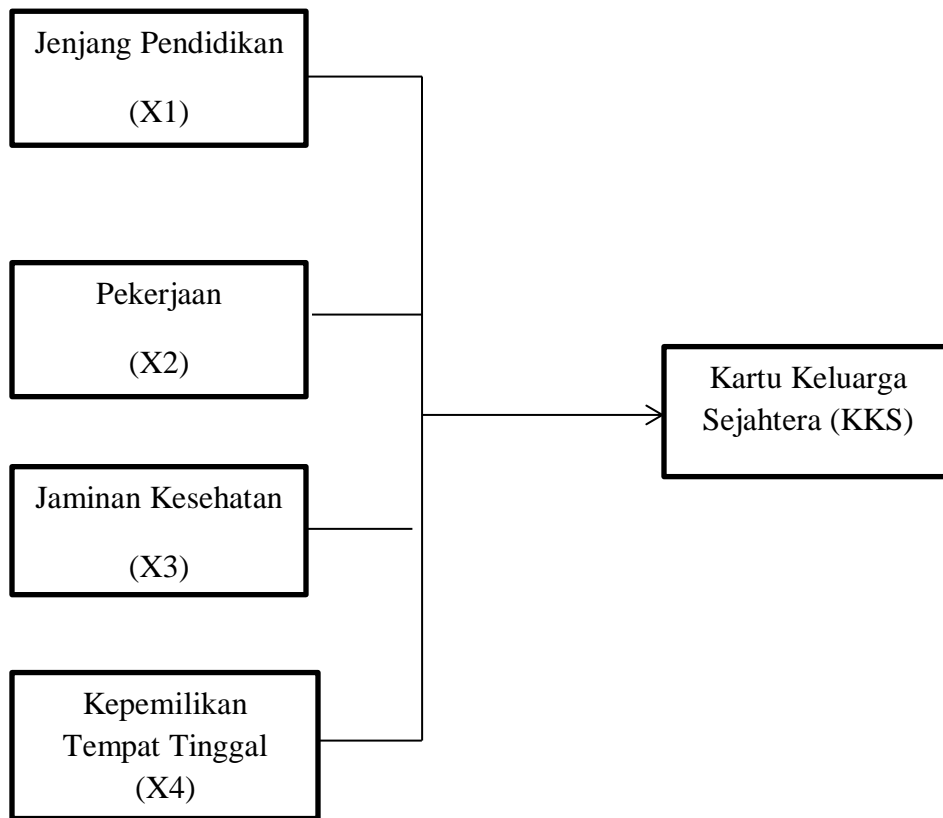
2. Andela Anggleni, (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang” yang Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan SekipJaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, belum berjalan secara efektif. Seperti masih terdapat penerima bantuan yang belum terdaftar, sosialisasi hanya dilakukan kepada penerima KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang digunakan adalah hasil pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak sesuai kondisi dilapangan, perlu pemberian pengarahan dan perhatian kepada masyarakat serta melakukan validasi dan pemutakhiran data guna meminimalisir kecemburuan sosial dimasyarakat.
3. Sulaeman Masnan dan Ahmad Nashir, (2020) yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera” Penanganan kemiskinan dengan model sistem kesejahteraan sosial di berbagai negara, dikenal empat model sistem, yang didasarkan pada alokasi anggaran yakni; 1) model universal di mana pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata; 2) model institusional, yaitu jaminan sosial dilaksanakan secara lembaga di mana kontribusi skim

jaminan sosial berasal dari tiga pihak (payroll contribution), yakni pemerintah, dunia usaha dan pekerja; 3) model residual yaitu jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan pengangguran; dan 4) model minimal, yaitu Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, hanya di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara.

4. Nurjoko dan Dona Yuliawati, (2015) yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW)” Hasil yang diperoleh dari sistem pendukung keputusan dalam menentukan penerima bantuan KKS yang menghasilkan data ranking masyarakat yang layak mendapatkan bantuan, sesuai dengan kondisi penentuan pada Desa Pujorahayu. Data ranking tersebut dapat dijadikan sebagai alternative pilihan untuk mengambil keputusan dalam musyawarah.
5. Dara Yolanda Framita, (2017) yang berjudul “Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KKS untuk mensejahterakan masyarakat desa belum optimal dilakukan, karena sumber dana yang belum bisa dicairkan. Jadi belum tau apakah program ini dapat mensejahterakan masyarakat atau tidak. Namun dilihat dari pendistribusian kartu sudah optimal.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan model atau konsep atau pemikiran yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting. Berdasarkan dari landasan teori yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini bekerja dengan kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

Dari kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa jenjang pendidikan, bidang pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kondisi tempat tinggal dapat mempengaruhi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual dapat diduga beberapa uraian hipotesis dibawah ini sebagai wujud jawaban sementara pada rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Adapun rumusan hipotesis sebagai berikut :

1. Jenjang Pendidikan diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Pekerjaan diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Jaminan Kesehatan diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Kepemilikan Tempat Tinggal diduga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$H_a : \beta_4 \neq 0$$

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel independen yaitu jenjang pendidikan, bidang pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kondisi tempat tinggal terhadap variabel dependen yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Sumatera Barat menggunakan data yang didapat dari, Data SUSENAS, Data Book, DJPK Kemenkeu dan website resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2022 sampai selesai.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepala rumah tangga pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:116). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling adalah teknik penentu sampel dengan kriteria tertentu. Alasan menggunakan purposive sampling dalam pemilihan sampel, karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih metode ini untuk menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel dalam penelitian ini untuk mendapatkan sampel yang representatif. Dalam penelitian ini kriteria yang ditentukan untuk memilih sampel adalah data yang dipublikasikan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah sampel yang dilakukan sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang sumbernya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017.

E. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas.

1. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan, pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kepemilikan tempat tinggal.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data sekunder yang berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2017.

G. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional ini untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Merupakan kepala rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah di programkan oleh pemerintah yang menggunakan dummy variable, dimana bernilai 1 jika Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan 0 jika Tidak.

2. Jenjang Pendidikan (X1)

Variabel pendidikan disini adalah variabel bebas (independen). Tingkat pendidikan diukur berdasarkan lama sekolah (*years of school*) yang dibutuhkan oleh responden dalam menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan satuan tahun (BPS Sumatera Barat). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana : jika

nilainya 1 maka tamatan SD, jika nilainya 2 maka SMP, jika nilainya 3 maka SMA, Jika 4 adalah D1/D2/D3, jika 5 adalah D4/S1, dan jika 6 adalah S2/S3.

3. Pekerjaan (X2)

Pada penelitian ini variabel pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang dimiliki peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pada penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1, maka bidang pekerjaan yang dimiliki bekerja pada sektor pertanian, dan 0 jika non pertanian.

4. Jaminan Kesehatan (X3)

Pada penelitian ini variabel jaminan kesehatan adalah jenis jaminan kesehatan yang dimiliki peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penelitian ini menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1 maka jaminan kesehatannya adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 0 jika (Non PBI, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/kantor, dan Tidak punya).

5. Kepemilikan Tempat Tinggal (X4)

Pada variabel kepemilikan tempat tinggal menggunakan variabel dummy dimana jika nilainya 1 maka status kepemilikan tempat tinggalnya kontak/sewa dan 0 jika (milik sendiri, bebas sewa, dinas, dan lainnya).

H. Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Logistik

Model analisis data yang digunakan untuk menganalisis penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat adalah menggunakan model analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen dimana variabel dependennya adalah dummy, yaitu satu dan nol. Peubah respon yang berskala biner adalah peubah yang hanya menghasilkan dua kategori saja, misalkan $y = 1$ menyatakan “penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)” sedangkan untuk $y = 0$ “tidak penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)”.

Secara matematis, pendefinisian probabilitas terjadinya peristiwa dalam bentuk model regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2002 : 249) :

$$P_i = \frac{1}{1+e^{-z_i}} \dots\dots\dots (3.1)$$

dan,

$$1 - P_i = \frac{1}{1+e^{z_i}} = \frac{e^{-z_i}}{1+e^{-z_i}} \dots\dots\dots (3.2)$$

Rasio antara P_i dan $1 - P_i$ adalah

$$\frac{P_i}{1-P_i} = \frac{\left(\frac{1}{1+e^{-z_i}}\right)}{\left(\frac{e^{-z_i}}{1+e^{-z_i}}\right)} = \frac{1}{e^{-z_i}} = e^{z_i} = e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)} \dots\dots\dots (3.3)$$

Persamaan 3.1 diatas disebut dengan *Odd* atau sering disebut *risiko* yaitu perbandingan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa.

Bila *odd* ini dilogkan, akan didapatkan log *odd* sebagai berikut :

$$L_i = \ln \frac{P_i}{1-P_i} = z_i = \beta_1 + \beta_2 X_i \dots\dots\dots (3.4)$$

Dengan demikian, model yang akan dianalisis menjadi (Nachrowi dan Usman, 2002 : 250) :

$$L_i = \ln \frac{P_i}{1-P_i} = \beta_1 + \beta_2 X_i \dots \dots \dots (3.5)$$

L disebut *log odd*

Dari persamaan diatas dapat dirumuskan model regresi logistik sebagai berikut :

$$L_i = \ln \frac{P_i}{1-P_i} = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i \dots \dots \dots (3.6)$$

Untuk variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) yang lebih dari satu disebut dengan *multiple logistic regression* maka persamaannya menjadi :

$$L_i = \ln \frac{P_i}{1-P_i} = \beta_1 + \beta_2 X_1 + \dots \dots \dots + \beta_n X_i + u_i \dots \dots (3.7)$$

Maka pada penelitian ini akan dipergunakan model yang dituliskan sebagai berikut :

$$\ln [p/ (1-p)] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots \dots \dots (3.8)$$

atau

$$\ln [p/ (1-p)] = \beta_0 + \beta_1 JP + \beta_2 P + \beta_3 JK + \beta_4 KTT + \varepsilon \dots \dots \dots (3.9)$$

Keterangan :

p = Persentase dari penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

(1-p) = Persentase dari lainnya

β_0 = Konstanta

β_i	= Koefisien Regrasi ($\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$)
JP	= Jenjang Pendidikan
P	= Pekerjaan
JK	= Jaminan Kesehatan
KTT	= Kepemilikan Tempat Tinggal

Sebelum melakukan proses *multiple logistic regression*, harus dilakukan dulu uji kolerasi terhadap variabel independennya. Uji tersebut dilakukan dengan uji χ^2 atau uji kolerasi terhadap kolerasi pearson. Bila diantara variabel independen ada yang mempunyai hubungan atau kolerasi yang kuat, maka salah satu dari variabel independennya harus dikeluarkan.

Untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien variabel regresi logistik digunakan fungsi *log likelihood* (G). jika $G > \chi^2$, berarti parameter model signifikan.

Berikut ini ditampilkan tabel variabel yang digunakan berdasarkan skala pengukurannya

Tabel 3.1
Variabel dan skala Pengukuran Data Analisa Logistik

Variabel	Label
Variabel Dependen	
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	1 = Penerima KKS 0 = Tidak penerima KKS
Variabel independen	
1. Jenjang Pendidikan	1 = SD 0 = Lainnya
2. Pekerjaan	1 = Bekerja di sektor Pertanian 0 = Non pertanian
3. Jaminan Kesehatan	1 = Penerima Bantuan Iuran (PBI) 0 = Non PBI, jamkesda, asuransi swasta, perusahaan/kantor, tidak punya
4. Kepemilikan Tempat Tinggal	1 = Kontrak/sewa 0 = Milik sendiri, bebas sewa, dinas, lainnya

I. Pengujian Hipotesis

a. Uji seluruh model (Uji G)

Statistik uji yang digunakan adalah :

$$G = -2Ln \left[\frac{Likelihood(ModelB)}{Likelihood(ModelA)} \right] \dots\dots\dots(3.10)$$

Model B : Model yang hanya terdiri dari konstanta saja

Model A : Model yang terdiri dari seluruh variabel

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = 0$$

H_1 : Sekurang-kurangnya terdapat satu $\beta_j \neq 0$

G berdistribusi chi Kuadrat dengan drajat bebas P atau $G \sim \chi_p^2$. H_0 ditolak jika $G > \chi_{\alpha, p}^2$; α : tingkat signifikansi.

Bila H_0 ditolak, artinya model A signifikan pada tingkat signifikansi α . Adapun nilai α yang digunakan adalah pada tingkat kepercayaan 0,05 (5%) (Nachrowi, Phil dan Usman, 2002: 255).

b. Uji Wald : Uji signifikansi tiap-tiap parameter

Statistik yang digunakan adalah :

$$W_j = \left[\frac{\hat{\beta}}{SE(\hat{\beta})} \right]^2 ; j = 0, 1, 2, \dots, P \dots\dots\dots(3.11)$$

$H_0 : \beta_j = 0$ untuk suatu j tertentu ; $j = 0, 1, \dots, P$.

$H_1 : \beta_j \neq 0$

Statistik ini berdistribusi Chi Kuadrat dengan derajat bebas 1(satu) atau secara simbolis dapat ditulis $W_j \sim \chi^2$. H_0 ditolak, bila parameter signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α . (Nachrowi dan Usman, 2002 : 256).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Kondisi Geografis Sumatera Barat

Daerah Sumatera Barat terletak di pantai barat tengah dengan daerah meliputi daratan dan daerah kepulauan. Posisi Sumatera Barat terletak antara 0°54" Lintang Utara dan 3°30" Lintang Selatan serta 98° 36' dan 101°53" bujur timur dengan luas wilayah sekitar 42.229,13 km², luas tersebut setara dengan 2,18 persen dari luas wilayah Negara Republik Indonesia.

Sumatera Barat terletak pada bagian tengah sebelah barat pulau Sumatera, berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, provinsi Jambi dan Bengkulu sebelah selatan, provinsi Riau di sebelah timur dan Samudera Hindia di sebelah barat.

Kondisi alam Sumatera Barat diliputi oleh kawasan hutan yaitu sekitar 60,59 persen dari keseluruhan. Sedangkan luas lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya pertanian sekitar 28,55 persen. Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota. Dintara 19 kabupaten/kota, kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah yang terluas yaitu 6,01 ribu km². 19 kabupaten/kota terbagi dalam 144 kecamatan yang seluruhnya terbagi lagi atas 53 nagari dan 1974 kelurahan.

Ketinggian permukaan daratan provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada daerah dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Kondisi alam Sumatera Barat sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan lindung yang mencapai sekitar 45,17 persen dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sekitar 54,82 persen.

Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir semua kabupaten, yaitu ada sekitar 17 gunung. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter yang terletak di Kabupaten Pasaman. Sumatera Barat juga memiliki danau yang berjumlah sekitar 4 danau, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya berada di Kabupaten Solok. Danau Singkarak merupakan danau terluas yaitu sekitar 13.011 ha.

Secara umum provinsi Sumatera Barat beriklim sedang dengan temperatur antara 32°C sampai 36°C dengan curah hujan rata-rata lebih dari 2000 mm per tahun. Hujan kebanyakan turun pada bulan September sampai Februari.

b. Keadaan Penduduk Sumatera Barat

Kesejahteraan penduduk adalah sasaran utama pembangunan. Sasaran ini tidak mungkin tercapai jika pemerintah tidak melakukan analisis yang serius dalam

menyikapi permasalahan kepadatan penduduk yang tidak merata di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penduduk adalah sumber daya yang sangat berguna dalam melakukan setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk pada umumnya selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya di Sumatera Barat. Perkembangan penduduk berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Penduduk yang berada di Kota Padang lebih banyak dari pada kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan kota Padang sebagai pusat industri yang banyak memberikan daya tarik kota seperti lapangan pekerjaan yang menjadi daerah pilihan penduduk dalam mencari pekerjaan. Kota Padang juga menyediakan fasilitas informasi, pendidikan, hiburan dan teknologi serta berbagai kegiatan lainnya yang dapat menambah tingkat pendapatan penduduk.

Provinsi Sumatera Barat dihuni oleh beragam suku bangsa namun mayoritas penduduknya adalah Suku Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (matrilineal dan pada umumnya memeluk agama Islam.

Jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jumlah penduduk yang tertinggi terdapat di Kota Padang sebesar 875.548 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat pada Kota Sawahlunto sebesar 54.685 jiwa. Daerah yang paling luas adalah kabupaten

Kepulauan Mentawai sebesar 6.011,35 km². Sedangkan daerah yang paling kecil luasnya adalah Kota Padang Panjang sebesar 23,00 km².

Berdasarkan kepadatan penduduk menurut kabupaten dan kota menunjukkan bahwa kepadatan penduduk Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dikalsifikasikan mulai dari golongan jarang sampai sangat padat. Daerah-daerah yang tergolong padat penduduknya umumnya ditemui diwilayah perkotaan, kecuali Kota Sawahlunto lebih rendah dari pada Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, namun demikian 75 persen dari penduduk Sumatera Barat berdomisili di wilayah Kabupaten. Hal itu terjadi karena wilayah Kabupaten lebih luas dari pada wilayah Kota. Terbukti wilayah Kabupaten mencakup 97 persen dari total luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan kota hanya 3 persen saja.

2. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Deskripsi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Kartu Keluarga sejahtera (KKS) merupakan kepala rumah tangga yang berstatus sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah di programkan oleh pemerintah di Sumatera Barat. Untuk mengetahui Kepala Rumah Tangga penerima maupun tidak penerima bantuan KKS tersebut dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Kepala Rumah Tangga Responden Penerima dan Bukan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Jumlah	Persentase
Penerima KKS	376	14.97
Tidak penerima KKS	2.135	85.02
Total	2.511	100.0

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 4.1 memiliki 2 status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu yang pertama Kepala Rumah Tangga yang penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan yang kedua yaitu Kepala Rumah Tangga yang tidak penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) . Dapat terlihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang penerima KKS di Sumatera Barat pada tahun 2017 yaitu berjumlah sebanyak 376 orang dengan persentase 14.97%. Sedangkan jumlah Kepala Rumah Tangga yang tidak penerima KKS yaitu sejumlah 2.135 orang dengan persentase 85.02%.

b. Deskripsi Jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan merupakan syarat Kepala Rumah Tangga penerima manfaat program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga tidak bersekolah atau SD. Untuk mengetahui tingkat pendidikan kepala rumah tangga bagi penerima maupun tidak penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut dapat terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
SD	164	43,62	670	31.39
Lainnya	212	56,39	1.465	68.62
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Jenjang pendidikan adalah urutan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Pada Tabel 4.2 diatas menampilkan jumlah penerima KKS berdasarkan jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD yaitu sebesar 43.62% sedangkan untuk persentase pada tingkat pendidikan lainnya yaitu sebesar 56.39%. Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa masih kurangnya kualitas pendidikan di provinsi Sumatera Barat karena tingkat pendidikan Kepala Rumah Tangga hanya sebatas tamat SD dan sederajat.

c. Deskripsi Pekerjaan

Lapangan pekerjaan merupakan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat bekerja yang dibagi atas pertanian, manufaktur, dan jasa. Dalam penelitian ini dibagi atas :

Tabel 4.3
Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Pekerjaan
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

Pekerjaan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sektor Pertanian	240	63.83	1.008	47.22
Non Pertanian	136	36.18	1.127	52.79
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 4.3 diatas ditampilkan jumlah Kepala Rumah Tangga yang bekerja berdasarkan pekerjaan pada sektor pertanian dan non pertanian. Persentase Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 63.83%. Sedangkan pada sektor non pertanian adalah sebesar 36.18%.

d. Deskripsi Jaminan Kesehatan

Jaminan Kesehatan merupakan syarat Kepala Rumah Tangga penerima manfaat program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dengan jaminan kesehatan Kepala Rumah Tangga adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk mengetahui jaminan kesehatan yang dimiliki kepala rumah tangga tersebut dapat terlihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Jaminan Kesehatan
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

Jaminan Kesehatan	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Penerima Bantuan Iuran (PBI)	300	79.79	535	25.06
Lainnya	76	20.22	1.600	74.95
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah Kepala Rumah Tangga yang jaminan kekehatannya Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu sebesar 300 orang dengan persentase 79.79%.

e. Deskripsi Kepemilikan Tempat Tinggal

Kepemilikan tempat tinggal merupakan suatu tempat rumah tangga untuk menetap dan bekerja. Untuk mengetahui status kepemilikan tempat tinggal yang dimiliki rumah tangga tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Jumlah Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Kepemilikan Tempat Tinggal
Di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017

Kepemilikan Tempat Tinggal	Penerima KKS		Bukan Penerima KKS	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Kontrak / Sewa	22	5.86	234	10.97
Lainnya	354	94.15	1.901	89.04
Total	376	100	2.135	100

Sumber : Susenas 2017, data diolah

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah penerima Kartu Keluarga Sejahtera menurut kepemilikan tempat tinggal rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggalnya kontrak/sewa adalah berjumlah 22 orang dengan persentase 5.86%. Sedangkan rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggal lainnya adalah berjumlah 354 orang dengan persentase 94.15%.

3. Hasil Estimasi Regresi Logistik

1. Analisis Regresi Logistik

Metode analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil estimasi regresi logistik dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan STATA dengan nilai signifikan $\alpha = 0,05$. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan pada nilai signifikan $< 0,05$ maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil dari estimasi Regresi Logistik :

Tabel 4.6
Hasil Pendugaan Parameter dan Odd Ratio Regresi Logistik

Variabel	Coef.	Wald (Z)	Prob.	Odds Ratio	Mfx
Jenjang Pendidikan	0.032	1.53	0.125	1.033	0.002
Pekerjaan	0.550	4.27	0.000	1.733	0.047
Jaminan Kesehatan	2.426	17.40	0.000	11.317	0.299
Kepemilikan Tempat Tinggal	-0.493	-1.97	0.049	0.610	-0.035
Constant	-3.363	-22.45	0.000	0.034	-

Sumber : Data diolah, output STATA 14,2022

Pada Tabel 4.6 menjelaskan bahwa variabel jenjang pendidikan tidak signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga pada karakteristik tersebut tidak berpeluang untuk menerima Kartu Keluarga Sejahtera. Pada karakteristik kepala rumah tangga lainnya seperti pekerjaan, jaminan kesehatan, dan kepemilikan tempat tinggal hasilnya signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan berpeluang dalam menerima KKS tersebut.

Untuk variabel Jenjang Pendidikan (X1) mempunyai parameter 0.032 dengan nilai odd ratio dari variabel jenjang pendidikan adalah 1.033 yang berarti bahwa kepala rumah tangga yang pendidikannya SD dan sederajat memiliki peluang 1.033 kali lebih kecil untuk penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) jika dibandingkan kepala rumah tangga yang pendidikan lainnya.

Untuk variabel Pekerjaan (X2) mempunyai parameter 0.550 dengan nilai odd ratio dari variabel pekerjaan adalah 1.733 yang berarti bahwa kepala rumah tangga yang pekerja pada sektor pertanian, maka peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah 1.733 kali lebih besar jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor non pertanian.

Untuk variabel Jaminan Kesehatan (X3) mempunyai parameter 2.426 dengan nilai odd ratio dari variabel jaminan kesehatan adalah 11.317 yang berarti jika kepala rumah tangga yang jaminan kesehatannya Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh KKS adalah 11.317 kali lebih besar jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang jaminan kesehatannya adalah lainnya.

Untuk variabel Kepemilikan Tempat Tinggal (X4) mempunyai parameter - 0.493 dengan nilai odd ratio dari variabel kepemilikan tempat tinggal adalah 0.610 yang berarti bahwa kepala rumah tangga yang memiliki kepemilikan tempat tinggal kontak/sewa maka peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh KKS adalah 0.610 kali lebih besar jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang kepemilikan tempat tinggal lainnya.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Likelihood Ratio (G)

Uji likelihood ratio test atau G adalah uji rasio kemungkinan yang digunakan untuk menguji peranan variabel penjelas didalam model secara bersama-sama. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$

Tabel 4.7
Hasil Uji Likelihood Ratio (G)

LR statistic	442.08
Prob(LR statistic)	0.0000

Sumber: Data Diolah (STATA, 2022)

Pada Tabel 4.7 terlihat bahwa nilai probabilitas (LR statistik) adalah 0.0000 dengan taraf nyata 5% signifikansi $0.000 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara bersama-sama variabel Jenjang Pendidikan, Pekerjaan, Jaminan Kesehatan, dan Kepemilikan Tempat Tinggal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang Kepala Rumah Tangga menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Sumatera Barat.

b. Uji Wald (Z statistik)

Uji Wald digunakan untuk menguji pengaruh tiap-tiap variabel penjelas terhadap variabel terikat. Uji ini mengikuti distribusi normal standard. Dengan demikian, nilai dari statistik memberikan indikasi variabel mana yang signifikan atau tidak layak dalam model. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.8
Hasil Uji Wald (Z statistik)

Variable	Coef	Std Err	Z	Prob
Constanta	-3.363	0.149	-22.45	0.000
Jenjang Pendidikan	0.032	0.021	1.53	0.125
Pekerjaan	0.550	0.129	4.27	0.000
Jaminan Kesehatan	2.426	0.139	17.40	0.049
Kepemilikan Tempat Tinggal	-0.493	0.250	-1.97	0.000

Sumber: Susenas 2017, data diolah STATA

Setelah melakukan uji hipotesis dapat diketahui bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dengan nilai probabilitas (LR statistik) adalah 0.05 (taraf nyata 5%) dan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 5%. Dari hasil uji secara parsial dapat dilihat bahwa diantara variabel bebas yang diteliti, variabel jenjang pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh bantaun Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Sumatera Barat dengan nilai probabilitasnya adalah 0.125 (taraf nyata 5%).

Selanjutnya analisis hasil estimasi dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Jenjang Pendidikan

Pada variabel jenjang pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh KKS. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi $0.000 > 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya jenjang pendidikan Kepala Rumah Tangga tidak berpengaruh terhadap peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh bantuan KKS di Sumatera Barat.

2) Pekerjaan

Pada variabel pekerjaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh KKS. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi $0.007 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pekerjaan Kepala Rumah Tangga berpengaruh terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh bantuan KKS di Sumatera Barat.

3) Jaminan Kesehatan

Pada variabel jaminan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh KKS. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya jaminan kesehatan Kepala Rumah Tangga berpengaruh terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh bantuan KKS di Sumatera Barat.

4) Kepemilikan Tempat Tinggal

Pada variabel kepemilikan tempat tinggal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peluang Kepala Rumah Tangga untuk memperoleh KKS. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi < 0.05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya kepemilikan tempat tinggal berpengaruh terhadap peluang kepala rumah tangga untuk memperoleh bantuan KKS di Sumatera Barat.

Tabel 4.9
Marginal Effect

Variable	dy/dx
Jenjang Pendidikan	0.002
Pekerjaan	0.047
Jaminan Kesehatan	0.299
Kepemilikan Tempat Tinggal	-0.035

Sumber: Susenas 2017, data diolah STATA

Untuk variabel jenjang pendidikan (X_1), secara rata-rata ketika nilai jenjang pendidikan naik sebesar satu satuan maka kemungkinan kepala rumah tangga memperoleh bantuan Kartu Keluarga Sejahtera akan turun sebesar 0.002 point.

Untuk variabel pekerjaan (X_2), secara rata-rata ketika nilai pekerjaan naik sebesar satu satuan maka kemungkinan kepala rumah tangga memperoleh bantuan Kartu Keluarga Sejahtera akan naik sebesar 0.047 point.

Untuk variabel jaminan kesehatan (X3), secara rata-rata ketika nilai jaminan kesehatan naik sebesar satu satuan maka kemungkinan kepala rumah tangga memperoleh bantuan Kartu Keluarga Sejahtera akan naik sebesar 0.299 point.

Untuk variabel kepemilikan tempat tinggal (X4), secara rata-rata ketika nilai kepemilikan tempat tinggal naik sebesar satu satuan maka kemungkinan kepala rumah tangga memperoleh bantuan Kartu Keluarga Sejahtera akan turun sebesar - 0.035 point.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Jenjang Pendidikan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas pertama adalah variabel jenjang pendidikan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.125. Artinya jika nilai P-value lebih besar dari taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_0 dan H_1 ditolak atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara jenjang pendidikan dengan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Jenjang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah merupakan salah satu komponen penyebab terjadinya kemiskinan. Peluang untuk mendapatkan

Program penerima Kartu keluarga Sejahtera (KKS) dengan tingkat pendidikan tidak pernah sekolah atau SD memiliki peluang 1.03 kali lebih kecil dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai pendidikan lainnya (SMP, SMA, Perguruan Tinggi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan nilai jenjang pendidikan akan memberikan kontribusi yang positif dan tidak signifikan terhadap peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Semakin rendah pendidikan maka peluang menerima program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat. Peserta penerima KKS dengan tingkat pendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan dan keahlian yang baik, peluang untuk mendapat pekerjaan atau membuka usaha lebih besar, sehingga mereka tidak akan masuk kedalam kategori penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2. Pengaruh Pekerjaan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas kedua adalah variabel pekerjaan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value 0.000. Maka artinya jika nilai P-value kecil dari taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima Ha

dan H0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara pekerjaan dengan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Pekerjaan merupakan aktivitas antar manusia untuk saling memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu. Peluang untuk mendapatkan KKS dengan pekerjaan sektor pertanian mempunyai peluang 1.73 kali lebih besar dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai jenis pekerjaan sektor non pertanian.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan pada nilai pekerjaan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jenis pekerjaan di sektor pertanian maka peluang menerima Program penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan penghasilan rumah tangga di sektor pertanian cenderung tidak tetap. Sedangkan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki jenis pekerjaan di sektor non pertanian dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka tidak akan masuk kedalam kategori Penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Pengaruh Jaminan Kesehatan Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel ketiga adalah variabel jaminan kesehatan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value 0.000. Maka artinya jika nilai P-value kecil dari taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_a dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara jaminan kesehatan dengan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Peluang untuk mendapatkan KKS dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) mempunyai peluang 11.31 kali lebih besar dibandingkan dengan peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa perubahan pada nilai jaminan kesehatan akan memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap peserta penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan jaminan kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) maka peluang menerima Program penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan semakin meningkat.

4. Pengaruh Kepemilikan Tempat Tinggal Terhadap Peluang Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Di Sumatera Barat

Variabel bebas yang keempat adalah kepemilikan tempat tinggal, dimana berdasarkan hasil logistik dinyatakan bahwa nilai P-value sebesar 0.049. Artinya jika nilai P-value lebih kecil dari taraf signifikansi 5%, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan menerima H_a dan H_0 ditolak atau terdapat pengaruh yang signifikan peluang terjadinya antara kepemilikan tempat tinggal dengan peserta penerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat.

Tempat tinggal merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk melindungi suatu individu atau keluarga sehingga merasa aman dan nyaman di dalamnya. Kepemilikan tempat tinggal dapat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika suatu rumah tangga mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka tidak perlu mengeluarkan biaya sewa atau kontrak rumah. Namun jika rumah tangga tersebut tidak mempunyai tempat tinggal sendiri maka mereka harus mengeluarkan uang untuk biaya kontrak atau sewa yang menambah beban pengeluaran rumah tangga tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nilai kepemilikan tempat tinggal akan memberikan kontribusi yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap kepala rumah tangga penerima KKS, dimana jika kepala rumah tangga tidak mempunyai rumah sendiri maka akan meningkatkan jumlah penerima KKS, sebaliknya apabila kepala rumah tangga mempunyai rumah sendiri maka akan

menurunkan kemungkinan kepala rumah tangga untuk menerima Kartu Keluarga Sejahtera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenjang Pendidikan (X1) memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga mempunyai jenjang pendidikan tertinggi adalah SD dan sederajat, maka semakin signifikan rumah tangga tersebut menerima program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitu pula sebaliknya.
2. Pekerjaan (X2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian, maka semakin banyak rumah tangga tersebut menerima bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitupula sebaliknya.
3. Jaminan Kesehatan (X3) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga jaminan kesehatan Penerima

Bantuan Iuran (PBI), maka semakin signifikan rumah tangga tersebut menerima program bantuan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Begitu pula sebaliknya.

4. Kepemilikan Tempat Tinggal (X_4) memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerima program Kartu Keluarga Sejahtera di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf nyata 5% yang artinya kepala rumah tangga memiliki tempat tinggal kontrak/sewa, maka pada variabel ini kepala rumah tangga berpengaruh signifikan untuk menerima KKS, Begitupula sebaliknya.
5. Secara bersama – sama variabel jenjang pendidikan (X_1), pekerjaan (X_2), jaminan kesehatan (X_3), dan kepemilikan tempat tinggal (X_4), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerima Kartu keluarga sejahtera (KKS) di Provinsi Sumatera Barat (Y) pada taraf signifikansi 5%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu :

1. Diharapkan adanya peninjauan ulang pemerintah terhadap rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) agar program pemerintah ini dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) untuk mendata kembali seluruh masyarakat yang tergolong miskin, sehingga seluruh masyarakat miskin memperoleh Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan ketetapan pemerintah, serta mensosialisasikan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi.

3. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus sesuai dengan pedoman umum dan kriteria KKS yaitu dengan sasaran rumah tangga yang ekonominya sulit atau yang sudah ditentukan berdasarkan basis data rumah sasaran penerima manfaat dan rumah tangga hasil musyawarah desa/kelurahan setempat.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain diluar variabel penelitian ini agar memperoleh hasil yang bervariasi sehingga dapat menjelaskan factor apa saja yang lebih berpengaruh terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.
- Badan Pusat Statistik, (2005) Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005.
- _____, (2009) „Profil Kemiskinan di Indonesia, Maret 2009.“Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th.XII. July 2009.
- _____,(2017). Survei Sosial ekonomi. Sumatera Barat : Badan Pusat Statistik.
- Boediono. 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE.
- Coleman dan, C. (2004). Klasifikasi Status Sosial. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/318288073_Pengaruh_Status_Sosial_dan_Kondisi_Ekonomi_Keluarga_terhadap_Motivasi_Bekerja_bagi_Remaja_Awal_Usia_1216_Tahun_di_Kabupaten_Ponorogo
- Framita, D. Y. (2017). Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
- Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta
- Jombang-Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 4(1), 461–469.
- Juariyah, S. (2010). Analisis kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal ekonomi dan pendidikan*, 7(1).

- Kartono. (1991 : 21). Pengertian Pekerjaan ditinjau dari segi sosial. Diambil kembali dari
 uny.ac.id:http://eprints.uny.ac.id/40851/1/Skripsi_DamarPutra_12601241029_PJKR.pdf
- Kuncoro, Murdrajat. 2006. “Ekonomi Pembangunan”, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mankiw N, Gregory, dkk. 2012, Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Masnan, S., & Nashir, A. (2020). PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA. *PILAR*, 11(2), 1-14.
- Muflikhati, I., Hartoyo, H., Sumarwan, U., Fahrudin, A., & Puspitawati, H. (2010). Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 3(1), 1-10.
- Mulyanto. (1985 : 2). Pengaruh Faktor Pekerjaan dalam Status Sosial Ekonomi Masyarakat . Diambil kembali dari uin-malang.ac.id: <http://etheses.uinmalang.ac.id/600/6/10410177%20Bab%202.pdf>
- Ngadiyono. (1986 : 46). 3 Macam Pendidikan berdasarkan Isi dan Program dan Penyelenggaraan. Diambil kembali dari
 coursehero:<https://www.coursehero.com/file/p3gmn5el/2-Pekerjaan-yang-menunjukkan-status-sosial-ekonomi-sedang-adalah-pensiunan-PNS/>
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. Kementrian Sosial. Program Kartu Keluarga Sejahtera.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
- Soekanto, M. (2007 : 207). Status dan Peran Sosial. Diambil kembali dari Jendela Ilmu:<http://wahyusofyanto55.blogspot.com/2015/08/status-dan-peran-sosial.html>
- Soeroto. (1986 : 167). Penjelasan mengenai Pekerjaan menurut Pendapat Soeroto. Diambil kembali dari The Blog Shifty:<https://blog.ub.ac.id/agrodan/?p=59>
- Suhendra, M. A., Ispriyanti, D., & Sudarno, S. (2020). Ketepatan Klasifikasi Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera Di Kota Semarang Menggunakan Metode Regresi Logistik Biner Dan Metode Chaid. *Jurnal Gaussian*, 9(1), 64-74.
- Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- World Bank Institute. 2008. Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.
- Yulawati, D. (2015). Sistem Pendukung Keputusan Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (Kks) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw. *Jurnal Teknologi Informasi Magister*, 1(02), 203-217.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Estimasi Logistik

```
. logit y x1 x2 x3 x4
```

```
Iteration 0: log likelihood = -1060.2944  
Iteration 1: log likelihood = -876.04331  
Iteration 2: log likelihood = -839.58086  
Iteration 3: log likelihood = -839.25273  
Iteration 4: log likelihood = -839.25265  
Iteration 5: log likelihood = -839.25265
```

```
Logistic regression                               Number of obs   =      2,511  
LR chi2(4)                                       =      442.08  
Prob > chi2                                       =      0.0000  
Log likelihood = -839.25265                       Pseudo R2      =      0.2085
```

y	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
x1	.0325161	.0212006	1.53	0.125	-.0090363	.0740686
x2	.5502312	.1290096	4.27	0.000	.297377	.8030853
x3	2.426336	.1394378	17.40	0.000	2.153043	2.699629
x4	-.4934765	.2505555	-1.97	0.049	-.9845563	-.0023967
_cons	-3.363381	.1498156	-22.45	0.000	-3.657015	-3.069748

Lampiran 2. Hasil Estimasi Logistik Odds Ratio

```
. logit y x1 x2 x3 x4, or
```

```
Iteration 0: log likelihood = -1060.2944
Iteration 1: log likelihood = -876.04331
Iteration 2: log likelihood = -839.58086
Iteration 3: log likelihood = -839.25273
Iteration 4: log likelihood = -839.25265
Iteration 5: log likelihood = -839.25265
```

```
Logistic regression                               Number of obs   =       2,511
                                                    LR chi2(4)      =       442.08
                                                    Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -839.25265                       Pseudo R2      =       0.2085
```

	y	Odds Ratio	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
	x1	1.033051	.0219013	1.53	0.125	.9910044 1.076881
	x2	1.733654	.223658	4.27	0.000	1.346323 2.232418
	x3	11.31734	1.578065	17.40	0.000	8.611021 14.87421
	x4	.6105003	.1529642	-1.97	0.049	.3736049 .9976062
	_cons	.034618	.0051863	-22.45	0.000	.0258094 .0464328

Lampiran 3. Hasil Estimasi Efek Marginal Rata-rata dari setiap variabel peubah (Multiplier) Model Logit

```
. mfx
```

```
Marginal effects after logit
```

```
y = Pr(y) (predict)
= .09375925
```

variable	dy/dx	Std. Err.	z	P> z	[95% C.I.]	X
x1	.0027628	.0018	1.53	0.125	-.000771 .006297	1.99283
x2*	.0471023	.01119	4.21	0.000	.025164 .069041	.497013
x3*	.2990632	.01766	16.93	0.000	.264447 .33368	.332537
x4*	-.0358382	.0154	-2.33	0.020	-.06603 -.005646	.101951

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

Lampiran 4. Hasil Estimasi Goodness of fit test

```
. estat gof
```

Logistic model for y, goodness-of-fit test

```
number of observations =      2511  
number of covariate patterns =      16  
Pearson chi2(11) =      13.13  
Prob > chi2 =      0.2847
```